

Evaluasi

Pembangunan Regional Pasca Kerusuhan di Maluku

Elia Radianto

Abstract

This paper has a purpose to evaluate development to the rate and typology of economic growth in Maluku. As a matter of fact, Location Quotient (LQ) and Regional Specialization Index (RSI) analysis are used to identify the key sector and change of regional economic structure. Besides the LQ & RSI analysis, Klassen Typology analysis is used to know the rate and typology of growth. Therefore, by using the analysis above, it's hoped that the policy maker will be helped to determine an exact development strategy based on the identification of the basis sector (key sector).

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi - Hasil bagi lokasi - Tipologi Klassen - Indeks Spesialisasi Regional

Key Words: Economic growth - Location Quotient - Klassen Typology - Regional Specialization Index

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini pembicaraan mengenai *trend* perkembangan perekonomian dan prospeknya di masa depan yang ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi di suatu daerah telah menjadi isu sentral. Hal ini dianggap menarik, karena pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama masa Orde Baru, telah membuat terjadinya perbedaan laju pembangunan antardaerah yang telah menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antardaerah, terutama antara Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pada umumnya pembangunan nasional di negara-negara berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur dengan besaran yang disebut produk domestik bruto (PDB) pada tingkat nasional dan produk domestik regional (PDRB) untuk daerah, baik untuk daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan kota.

Pelaksanaan pembangunan Indonesia selama ini juga tidak lepas dari pandangan di atas yang secara nasional berdampak pada struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan industri, misalnya menyebabkan sektor industri di tingkat nasional maupun daerah terjadi peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada variabel seperti pendapatan (produksi), kesempatan kerja atau nilai tambah sebagai proporsi yang lebih besar daripada proporsi sebelumnya dalam struktur perekonomian daerah selama kurun waktu tertentu.

Struktur industri hanyalah salah satu sektor dari perekonomian daerah. Apakah sektor-sektor lain juga menunjukkan prestasi yang meningkat sesuai dengan prestasi sektor-sektor yang sama di tingkat nasional? Tentunya ada sektor-sektor lain yang mengalami peningkatan atau penurunan. Bagaimana dengan prestasi setiap sektor di Maluku yang baru saja bangkit dari kerusuhan yang berkepanjangan?

Provinsi Maluku yang berada di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), memiliki struktur ekonomi yang berbeda dengan provinsi di daerah lain dan bahkan secara nasional. Hal ini disebabkan daerah ini masih dalam taraf pemulihan dari adanya kerusuhan yang

berkepanjangan sejak awal tahun 1999. Walaupun demikian seiring dengan mulai membaiknya situasi keamanan di Maluku, tampaknya telah membuat keberadaan sektor jasa mulai tumbuh subur.

Kemampuan sektor jasa di Provinsi Maluku dalam menunjang pembangunan melalui PDRB, sebenarnya telah terlihat sejak tahun 1971 (sebelum kerusuhan), di mana telah terjadi perubahan struktur ekonomi yang tercermin pada perubahan kontribusi masing-masing sektor dalam menyumbang terhadap PDRB Kota Ambon. Kontribusi sektor pertambangan, industri, listrik dan air minum dan sektor pembangunan, walaupun tidak mengalami peningkatan, namun lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2001. Sedangkan sektor yang lain mengalami peningkatan.

Apabila sektor-sektor tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok sektor yaitu sektor *Agriculture* atau A (pertanian), sektor *Manufacture* atau M (pertambangan, industri, listrik dan air minum dan sektor bangunan), dan sektor *Service* atau S (pengangkutan dan komunikasi, perdagangan dan jasa), maka akan tampak bahwa arah perubahan atau pergeseran struktur ekonomi di Provinsi Maluku pada periode 1997-2001, masih didominasi oleh sektor S (pengangkutan dan komunikasi, perdagangan dan jasa) dan sektor A (pertanian) bukan sektor industri (M). Hal ini tampak dari besarnya kontribusi sektor industri yang mengalami penurunan selama periode 1997-2001 yaitu dari 26,05 persen menjadi 7,34 persen. Sedangkan sektor A pada periode yang sama, hanya terjadi peningkatan sebesar 7,14 persen atau meningkat dari 26,20 persen menjadi 33,34 persen.

Pada sisi lain, berbeda dengan kedua sektor di atas, sektor S selama periode 1997-2001, tetap mendominasi kontribusi terhadap PDRB dengan menyumbang dari 47,75 persen pada tahun 1997 menjadi 59,32 persen di tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan di Provinsi Maluku. Meskipun demikian apabila dilihat besaran angka pergeseran per sektor, maka keberadaan sektor lainnya tidak dapat diabaikan, apalagi jika pengamatan lebih difokuskan pada potensi subsektor di setiap kabupaten/kota dalam menunjang struktur ekonomi regional Provinsi Maluku. Oleh karena itu dengan studi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan (*policy makers*) dalam upaya meningkatkan pembangunan regional di Provinsi Maluku.

2. KONSEP PEMBANGUNAN REGIONAL

Salah satu aspek pembangunan regional adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur. Perubahan struktur ekonomi dapat berupa peralihan dari kegiatan perekonomian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, serta perubahan status kerja buruh. Karena itu konsep pembangunan regional sangat tepat bila didukung dengan teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi.

Menurut Kuznet (Sukirno, 1985: 77), perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktural ditandai dengan adanya perubahan persentase sumbangan berbagai sektor-sektor dalam pembangunan ekonomi, yang disebabkan intensitas kegiatan manusia dan perubahan teknologi. Analisis *Shift-Share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi dibandingkan dengan perekonomian nasional. Demikian pula dalam penelitian, analisis *Shift-Share* sering diikuti oleh penggunaan *Location Quotient* (LQ) sebagai salah satu teknik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan apakah setiap produk/jasa, kategori produk, industri atau sektor ekonomi regional (Soepono, 2001 : 41-53; Arsyad, 1997 : 290).

Kaitannya dengan sektor unggulan, menurut Perroux (Kuncoro dan Aswandi, 2002 : 27-45), bahwa industri unggulan (*L'industrie matrice*) merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah. Adanya sektor/industri unggulan memungkinkan dilakukannya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung pada industri unggulan atau pusat pertumbuhan daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif.

Teori pertumbuhan regional berbasis ekspor menurut Hoover (1984), menerangkan bahwa beberapa aktivitas di suatu daerah adalah *basic*, dengan kata lain pertumbuhannya menimbulkan serta menentukan

pembangunan menyeluruh daerah tersebut. Sedangkan aktivitas-aktivitas lain (*non-basic*) merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruhnya. Begitupun menurut Bendavid-Val (1991), menyatakan bahwa semua pertumbuhan regional ditentukan oleh sektor *basic*, sedangkan sektor *non-basic* yang mencakup aktivitas pendukung, seperti perdagangan, jasa-jasa perseorangan, produksi *input* untuk produk-produk di sektor *basic*, melayani industri-industri di sektor *basic* maupun pekerja-pekerja beserta keluarganya di sektor *basic* (Soepono, 2001: 41-53).

Bila fakta tentang tingkat pertumbuhan ekonomi digabung secara sistematis dengan tingkat pendapatan per kapita maka akan diperoleh gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi regional suatu daerah dengan menggunakan *Klassen Typology*. Melalui analisis ini diperoleh 4 karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*); (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*); (3) daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan; (4) daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Soepono P., 1993: 43-54, Sjafrizal, 1997 : 27-38, Kuncoro dan Aswandi, 2002 : 27-45).

Demikian juga, dalam kaitannya dengan upaya mempercepat pembangunan regional maka keterkaitan ekonomi antar daerah juga merupakan hal penting, apalagi ini dikaitkan dengan konsep spesialisasi. Adanya spesialisasi komoditas sesuai dengan sektor/subsektor unggulan yang dimiliki memungkinkan dilakukannya pemusatan kegiatan sektoral pada masing-masing daerah. Demikian juga menurut Kuncoro dan Aswandi (2002 : 27-45) yang mengutip dari Samuelson dan Nordhaus (1995), menyatakan bahwa masyarakat dapat lebih efektif dan efisien jika terdapat pembagian kerja, yang membagi keseluruhan proses produksi menjadi unit-unit khusus yang terspesialisasi. Ekonomi spesialisasi telah memungkinkan terbentuknya jaringan perdagangan antar individu dan antar negara yang demikian luas, yang merupakan ciri dari suatu perekonomian maju. Adanya keterkaitan ekonomi (spesialisasi) antar daerah yang mendorong proses pertukaran sesuai kebutuhan masing-masing, akan memungkinkan Bergeraknya perekonomian masing-masing daerah secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan.

3. HASIL ANALISIS

3.1. Analisis *Klassen Typology*

Klassen Typology, pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horisontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*); (2) daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*); (3) daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan; (4) daerah relatif tertinggal (*low growth dan low income*) (Soepono P., 1993: 43-54), dan Kuncoro dan Aswandi, 2002: 30).

Kriteria yang digunakan dalam membagi daerah penelitian adalah sebagai berikut: (1) daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku; (2) daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Maluku; (3) daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tapi pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Maluku; (4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Maluku. Disebut "tinggi" apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibanding rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku; digolongkan "rendah" apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibanding rata-rata seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai perbandingan PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB untuk masing-masing kabupaten/ kota selama periode 1997-2001, beserta rata-ratanya untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku, dapat diikuti pada Tabel 1 dan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tanpa Migas
Kabupaten/Kota di Maluku, 1997 – 2001

Kabupaten /Kota	1997	1998	1999	2000	2001	Rata-rata
Koto Ambon	2.241.932,59	1.992.988,29	1.857.732,95	2.333A42,57	2.058.703,83	2.096.900,05
Maluku Tengah	936.133,85	856.892,11	532.716,97	538.349,59	535.880,39	678.194,58
Maluku Tenggara	1.017.639,15	896.628,85	867.127,43	843.143,85	860.831,95	897A24,25
M. Tenggara Barat	806.187,21	767.432,38	766.943,26	779A85,62	800.503,01	784.050,30
Pulau Buru	1.251.288,67	1.078.878,29	701.223,73	582.675,87	577.817,24	838.376,76
Provinsi Maluku	1.281.302,70	1.153.210,30	907.618,01	928.139,92	888.449,06	1.031.744,00

Sumber: Maluku, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten di Maluku Menurut Lapangan Usaha (data diolah)

Tabel 2
Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Kabupaten/Kota
di Maluku, 1997 - 2001 (Dalam %)

Kabupaten/Kota	1998	1999	2000	2001	Rata-rata
Kota Ambon	-7,33	-24,50	-7,23	-7,76	-12,04
Maluku Tengah	-5,97	-40,85	-4,06	1,11	-14,29
Maluku Tenggara	0,14	-6,53	15,15	4,87	3,11
Maluku Tenggara Barat	0,61	-7,69	7,37	3,56	0,81
Pulau Buru	-99,91	-36,13	-8,85	0,121	-14,86
Propinsi Maluku	-5,901	-27,57	-2,46	-2,00	-10,16

Sumber: BPS Maluku, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Maluku Menurut Lapangan Usaha (data diolah)

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, kita dapat membagi kabupaten/kota di Maluku menjadi 4 klasifikasi sesuai dengan tipologi Klassen (lihat Tabel 3). Dari kelima kabupaten/kota di Maluku, terdapat satu-satunya daerah Kawasan Andalan yang dikenal dengan KAPET Seram yang kawasannya berada di Kabupaten Maluku Tengah, ternyata termasuk dalam katagori daerah relatif tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa, kurang tepatnya penetapan kawasan andalan di Maluku, apabila dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu persyaratan penetapannya yang termasuk dalam katagori daerah relatif tertinggal.

Daerah yang bukan kawasan andalan terbagi dalam tiga klasifikasi, yang terdiri dari satu daerah berada pada klasifikasi daerah maju tapi tertekan yaitu Kota Ambon. Sebanyak dua daerah berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat yang terdiri dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat. Sedangkan yang termasuk dalam kategori relatif tertinggal selain Kabupaten Maluku Tengah adalah Kabupaten Pulau Buru.

Dari keempat klasifikasi tersebut di atas, tidak satupun kabupaten/kota yang termasuk dalam katagori daerah cepat maju dan cepat tumbuh (lihat Tabel 3). Hal ini menunjukkan bahwa tidak satupun kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita lebih tinggi sepanjang periode penelitian dibandingkan dengan Propinsi Maluku. Hasil yang didapat ini dapat dimaklumi, mengingat semua kabupaten/kota selain ada yang terkena dampak krisis moneter, juga semuanya mengalami kerusuhan sehingga perekonomiannya ibaratkan jatuh tertimpa tangga.

Tabel 3
Klasifikasi Kabupaten/Kota Propinsi Maluku
Menurut Klassen Typology, 1997 - 2001

Laju Pertumbuhan (r)	PDRB per kapita (y)	
	$Y_1 > y$	$Y_1 < y$
$r_1 > r$	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh	Daerah Berkembang Cepat Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat
$r_1 < r$	Daerah Maju Tapi Tertekan Kota Ambon	Daerah Relatif Tertinggal Maluku Tengah dan Pulau Buru

Sumber: Tabel 1 dan Tabel 2 (data diolah)

Walaupun demikian, Kota Ambon masih termasuk dalam daerah yang berada pada klasifikasi maju tapi tertekan, yang pada dasarnya memiliki pendapatan per kapita yang cukup tinggi, hanya saja selama periode pengamatan (1997-2001), perekonomiannya mengalami tekanan baik karena krisis moneter sejak pertengahan 1997, maupun kerusakan sejak awal tahun 1999. Lemahnya sektor penyangga perekonomian Kota Ambon terhadap krisis moneter dan kerusakan telah membuat terjadinya pertumbuhan negatif berturut-turut -7,33 persen tahun 1998, -24,50 persen tahun 1999, -7,23 persen tahun 2000 dan -7,76 persen tahun 2001. Subsektor yang mengalami tekanan krisis moneter dan kerusakan adalah subsektor perikanan, industri, listrik, air bersih, bank, dan lembaga keuangan tanpa bank. Sedangkan subsektor yang mengalami tekanan pada masa kerusakan hingga kini (1999-2001), adalah subsektor komunikasi.

Kabupaten Maluku Tengah sebagai kabupaten yang di dalamnya terdapat KAPET Seram, berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal, berkaitan erat dengan rendahnya kegiatan pembangunan. Berdasarkan data tahun 2001, realisasi anggaran pembangunan daerah ini hanya sebesar 16,26 persen dari total pengeluarannya. Nilai realisasi anggaran pembangunan tersebut merupakan nilai terendah dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembangunan daerah lainnya di Provinsi Maluku. Rendahnya alokasi dana untuk kegiatan pembangunan tersebut menunjukkan kurangnya insentif untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Maluku Tengah. Nilai investasi yang berhasil diserap berasal dari penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu sebesar Rp 2.747.229,15 (juta) atau 17,89 persen dari total investasi PMDN Provinsi Maluku. Begitupun juga untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$ 9.816,20 (juta) atau 5,30 persen dari total investasi Propinsi Maluku. Selain dua kondisi yang kurang mendukung terhadap pertumbuhan dan pendapatan per kapita tersebut, perekonomiannya juga menunjukkan pertumbuhan negatif sepanjang periode 1997-2000, kecuali akhir tahun pengamatan (tahun 2001) yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Posisi yang sama juga dialami oleh Kabupaten Pulau Buru, yang baru saja mekar dari Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2000. Dilihat dari struktur perekonomiannya, Kabupaten Pulau Buru memiliki kesamaan dengan Kabupaten Maluku Tengah dalam hal subsektor penopang perekonominya. subsektor

tersebut seperti antara lain subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, bangunan, perdagangan besar dan eceran, hotel, restoran, pengangkutan, jasa perusahaan, pemerintahan umum dan swasta. Meskipun demikian, pola pertumbuhan kedua daerah tersebut menunjukkan adanya perbedaan, yaitu Kabupaten Pulau Buru memiliki pertumbuhan ekonomi lebih lambat dibandingkan dengan Kabupaten Maluku Tengah.

Dua daerah lainnya, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat yang merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibanding rata-rata propinsi, namun pendapatan per kapitanya lebih rendah dari rata-rata propinsi. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah yang berada pada klasifikasi ini, didorong oleh pertumbuhan subsektor perkebunan, peternakan, perikanan, penggalian, industri, bangunan, hotel dan restoran.

Dengan demikian berdasarkan pembahasan klasifikasi posisi perekonomian menurut tipologi Klassen di atas, maka apabila dilihat dari persyaratan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa tidak satupun kabupaten/kota berada pada daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Hal ini tampaknya diakibatkan oleh adanya tekanan perekonomian yang bertubi-tubi di Propinsi Maluku baik oleh adanya krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997, maupun oleh adanya kerusuhan yang berkepanjangan sejak awal tahun 1999. Sedangkan khususnya bagi wilayah KAPET Seram yang merupakan satu-satunya daerah KAPET dipropinsi Maluku, yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, apabila dilihat dari persyaratan pertumbuhan ekonomi maka posisinya berada pada klasifikasi relatif tertinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa penetapan KAPET Seram sebagai kawasan andalan perlu mendapat perhatian pemerintah.

3.2. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) yang dimaksudkan di sini, adalah untuk menentukan subsektor unggulan perekonomian suatu daerah, yang mengacu pada formulasi Bendavid-Val (Soepono P., 1993 : 43-54, dan Koncoro dan Aswandi, 2002 : 27-45), dengan model sebagai berikut:

$$LQ = \frac{X_r / RV_r}{X_n / RV_n} \text{ atau } LQ = \frac{X_r / X_n}{RV_r / RV_n}$$

dimana:

X_r : Nilai Produksi subsektor i pada daerah tingkat II dan Kota di Maluku

RV_r : Total PDRB pada masing-masing daerah tingkat II dan Kota di Maluku

X_n : Nilai Produksi subsektor i pada daerah Provinsi Maluku

RV_n : Total PDRB Propinsi Maluku

Kriteria pengukuran model di atas yaitu ; (a) bila $LQ > 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama di tingkat nasional; (b) bila $LQ < 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama di tingkat nasional; (c) bila $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat nasional.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila $LQ > 1$, berarti subsektor tersebut bukan merupakan subsektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Begitupun sebaliknya bila nilai $LQ < 1$, berarti subsektor tersebut bukan merupakan subsektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Tabel 4
*Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten/Kota
 di Maluku Tahun 1997 dan 2001*

Lapangan Usaha	Location Quotient Tahun 1997					Location Quotient Tahun 2001				
	Kota AMB	Kab. MTH	Kab. MTA	Kab. MTB	Kab. PB	Kota AMB	Kab. MTH	Kab. MTA	Kab. MTB	Kab. PB
Tanaman Bahan Makanan	0,21	1,00	2,14	3,19	2,05	0,19	1,24	1,22	2,03	2,68
Perkebunan	0,05	1,42	1,38	1,98	3,22	0,05	1,72	0,76	1,20	4,14
Peternakan	0,40	1,25	0,88	2,50	2,01	0,39	1,36	0,58	1,76	2,85
Kehutanan	0,02	1,90	0,29	0,40	4,07	0,02	2,28	0,55	0,38	4,09
Perikanan	1,42	0,25	1,80	1,74	0,14	1,04	0,43	1,88	1,45	0,26
Pertambangan Tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggalian	0,50	1,79	1,03	1,14	0,54	0,28	1,47	1,11	1,92	1,69
Industri Tanpa Migas	0,56	2,01	0,02	0,05	1,37	0,39	2,94	0,05	0,11	0,93
Listrik	1,73	0,37	0,59	0,51	0,34	1,57	0,62	0,64	0,58	0,56
Air Bersih	1,42	0,76	0,78	0,27	0,54	1,08	1,32	0,73	0,27	1,10
Bangunan	0,55	1,37	1,08	0,90	2,02	0,52	1,34	0,88	1,67	1,69
Perdagangan Besar & Eceran	1,07	0,95	1,21	1,04	0,60	0,63	1,11	1,28	1,16	0,73
Hotel	2,07	0,21	0,11	0,04	0,05	2,26	0,24	0,08	0,03	0,06
Restoran	1,63	0,61	0,32	0,27	0,46	1,70	0,74	0,21	0,18	0,51
Pengangkutan	1,62	0,60	0,42	0,30	0,42	1,68	0,81	0,29	0,22	0,57
Komunikasi	2,05	0,14	0,34	0,17	0,05	1,99	0,34	0,47	0,23	0,12
Bank	2,03	0,08	0,51	0,37	0,02	2,01	0,13	0,60	0,48	0,03
Lembaga Keuangan Tanpa Bank	1,23	0,35	0,18	1,17	0,10	2,05	0,47	0,13	0,12	0,15
Sewa Bangunan	1,39	0,70	0,71	1,05	0,30	1,10	0,96	0,74	1,21	0,75
Jasa Perusahaan	1,95	0,08	0,73	0,55	0,07	1,98	0,11	0,63	0,52	0,13
Pemerintah Umum	1,41	0,64	1,10	0,76	0,30	1,49	0,75	0,66	0,50	0,62
Swasta	0,92	0,83	1,67	1,92	0,56	0,92	0,97	0,94	1,36	0,73

Sumber: BPS Maluku, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Maluku Menurut Lapangan Usaha (data diolah)

Keterangan: AMB = Ambon, MTH = Maluku Tengah, MTA = Maluku Tenggara
 MTB = Maluku Tenggara Barat, PB = Pulau Buru

Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Propinsi Maluku memiliki nilai LQ lebih besar dari satu untuk beberapa subsektor lapangan usaha baik sebelum terkena dampak krisis dan kerusakan tahun 1997 maupun dalam taraf pemulihan dari adanya kedua dampak tersebut pada tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa semua kabupater/kota di Propinsi Maluku memiliki subsektor unggulan (lihat Tabel 4).

Dilihat dari keunggulan subsektor per kabupaten/kota, tampaknya ada yang memiliki keunggulan yang sama baik sebelum terkena dampak krisis dan kerusakan maupun setelah terkena kedua dampak tersebut. Kota Ambon memiliki keunggulan yang sama dengan Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat untuk subsektor perikanan. Begitupun juga Kota Ambon memiliki keunggulan yang sama dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk subsektor sewa bangunan. Sedangkan untuk subsektor perdagangan besar dan eceran, Kota Ambon memiliki keunggulan yang sama dengan Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat sebelum kerusakan (1997) namun setelah kerusakan (2001), ditambah lagi satu kabupaten dengan keunggulan yang sama yakni Kabupaten Maluku Tengah.

Mencermati ke 22 subsektor lapangan usaha tersebut, menunjukkan bahwa terdapat satu diantaranya yang bukan merupakan unggulan dan daya saingnya tidak dimiliki oleh daerah di kawasan andalan (Kabupaten Maluku Tengah), kecuali Kabupaten Pulau Buru yang struktur ekonominya sama karena merupakan kabupaten yang baru saja mekar dan Kabupaten Maluku Tengah yakni untuk subsektor perikanan. Hal ini tampaknya menarik untuk dicermati dan diarahkan pada upaya saling mengisi (pertukaran antara daerah penghasil subsektor tersebut dengan daerah di kawasan andalan (Kabupaten Maluku Tengah) dan Kabupaten Pulau Buru. Dengan demikian Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Buru dapat dijadikan sasaran pasar atas komoditi tersebut.

Pada sisi lain, berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, menunjukkan bahwa tidak terdapat keunggulan yang sama pada seluruh kabupaten/kota di Propinsi Maluku. Adanya perbedaan daya saing atau keunggulan subsektor tersebut, menunjukkan bahwa hal ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan spesialisasi produksi antardaerah, sehingga membuka peluang untuk saling melakukan pertukaran

komoditas sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa pertumbuhan suatu daerah akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan daerah lainnya. Peran pemerintah daerah untuk memberdayakan sektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah sangat diperlukan, terutama dalam proses pertukaran komoditas antardaerah sehingga pada gilirannya akan mendorong masuknya pendapatan dari luar daerah ke dalam suatu daerah.

3.3. Analisis Spesialisasi Regional

Pendekatan model analisis spesialisasi regional yang digunakan di sini, dimaksudkan untuk mengetahui tingkat spesialisasi antardaerah di Propinsi Maluku, dengan menggunakan indeks Krugman sebagaimana diterapkan oleh Kim (1996) dengan model sebagai berikut (Kuncoro dan Aswandi, 2002 : 27-45) :

$$Sljk = \sum_{i=1}^n \left| \frac{Eij}{Ej} - \frac{Eik}{Ek} \right|$$

dimana:

- $Sljk$ = Indeks Spesialisasi Kabupaten j dan k
- Eij = PDRB Sektor i pada Kabupaten j
- Ej = Total PDRB Kabupaten j
- Eik = PDRB Sektor i pada Kabupaten k
- Ek = Total PDRB Kabupaten k

Kriteria pengukuran menurut model di atas, adalah apabila indeks spesialisasi regional mendekati nol maka kedua daerah j dan k tidak memiliki spesialisasi, dan bila indeks spesialisasi regional mendekati dua maka kedua daerah j dan k memiliki spesialisasi. Batas tengah antara angka nol dan dua tersebut adalah satu. Oleh karena itu, nilai indeks spesialisasi yang lebih besar dari satu dapat dianggap sebagai sektor atau subsektor yang memiliki spesialisasi. Sedangkan untuk melihat tinggi rendahnya tingkat spesialisasi suatu daerah terhadap daerah lainnya,

sebagai pembanding dipergunakan nilai rata-rata indeks spesialisasi seluruh daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks spesialisasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai rata-rata indeks spesialisasi kabupaten/kota di Propinsi Maluku yaitu dari 0,30 pada tahun 1997 menjadi 0,28 pada tahun 2001. Terjadinya penurunan nilai rata-rata indeks spesialisasi tersebut tampaknya disebabkan oleh adanya penurunan rata-rata indeks spesialisasi pada Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Buru.

Penurunan rata-rata indeks spesialisasi pada daerah kawasan andalan (Kabupaten Maluku Tengah) sebesar 0,01 sedangkan Kabupaten/kota lainnya yang juga mengalami hal yang sama dan bukan kawasan andalan masing-masing adalah Kota Ambon sebesar 0,02 dan Kabupaten Pulau Buru sebesar 0,12. Lain halnya dengan ketiga daerah di atas, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat justru sedikit mengalami peningkatan yaitu untuk Kabupaten Maluku Tenggara meningkat dari 0,21 tahun 1997 menjadi 0,22 atau meningkat sebesar 0,01 dan untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat meningkat dari 0,23 tahun 1997 menjadi 0,25 tahun 2001 atau meningkat sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa, terdapat 2 kabupaten pada kawasan bukan andalan yang memiliki perkembangan tingkat spesialisasi lebih baik dibandingkan dengan kawasan andalan. Untuk lebih jelasnya angka indeks spesialisasi antardaerah secara rinci dapat diikuti pada Tabel 5 dan Tabel 6 berikut :

Tabel 5
Indeks Spesialisasi Regional Kabupaten/kota
Di Provinsi Maluku Tahun 1997

Kabupaten/Kota	Kabupaten Kota					Rata-rata
	K.AMB	MTH	MTA	MTB	P.Buru	
K Ambon		0,47	0,16	0,24	0,63	0,38
M. Tengah			0,33	0,25	0,16	0,30
M. Tenggara				0,02	0,34	0,21
MTB					0,40	0,23
P. Buru						0,38
					Rata-Rata	0,30

Sumber: Tabel 4 (data diolah)

Keterangan: AMB = Ambon, MTH = Maluku Tengah, MTA = Maluku Tenggara, MTB = Maluku Tenggara Barat, PB = Pulau Buru

Tabel 6
Indeks Spesialisasi Regional Kabupaten/Kota
Di Provinsi Maluku Tahun 2001

Kabupaten/Kota	Kabupaten Kota					Rata-rata
	K.AMB	MTH	MTA	MTB	P.Buru	
K Ambon		0,41	0,22	0,32	0,50	0,36
M. Tengah			0,25	0,38	0,10	0,29
M. Tenggara				0,14	0,28	0,22
MTB					0,14	0,25
P. Buru						0,26
Rata-rata						0,28

Sumber: Tabel 4 (data diolah)

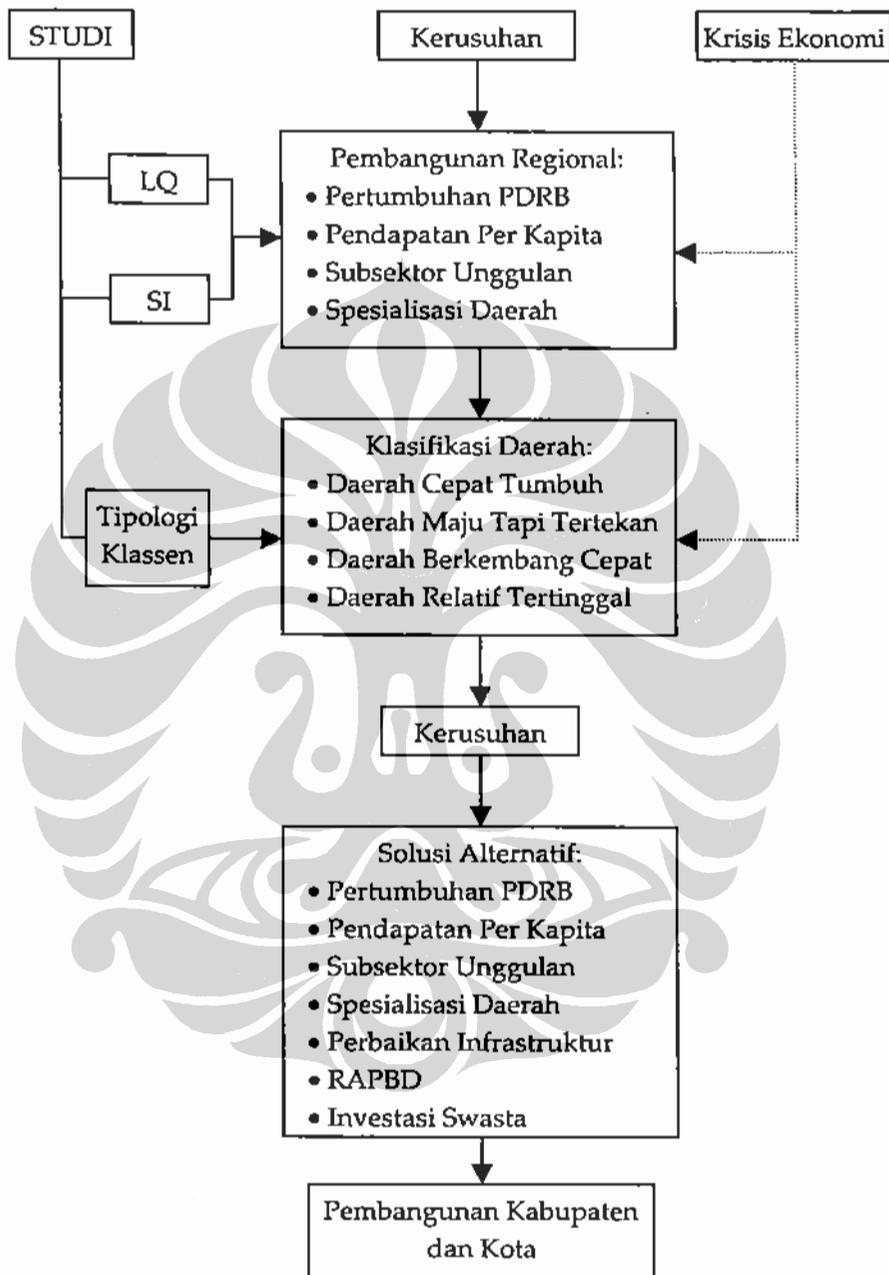
Terjadinya penurunan rata-rata indeks spesialisasi baik pada Kota Ambon maupun Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Pulau Buru, menunjukkan bahwa semakin terdiversifikasinya subsektor usaha pada ketiga daerah ini terhadap kedua daerah lainnya yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sebaliknya, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, menunjukkan adanya peningkatan indeks spesialisasi. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin terspesialisasinya subsektor usaha kedua kabupaten ini terhadap tiga Kabupaten lainnya.

Walaupun demikian, apabila dilihat dari rata-rata indeks spesialisasi artardaerah menunjukkan bahwa, hanya Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki nilai rata-rata indeks lebih tinggi dari rata-rata indeks spesialisasi seluruh kabupaten/kota. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat spesialisasi yang dimiliki bukanlah sebuah jaminan bahwa suatu daerah dapat ditetapkan sebagai kawasan andalan, mengingat nilai rata-rata indeks spesialisasi kabupaten Maluku Tengah yang di di daerahnya terdapat KAPET Seram, sama dengan kabupaten lainnya di Maluku yakni di bawah satu. Sedangkan apabila hasil ini dikaitkan dengan hasil analisis menurut Tipologi Klassen maka tampaknya daerah maju seperti Kota Ambon lebih tespesialisasi dibandingkan dengan daerah berkembang dan relatif tertinggal.

Akhirnya, gambar alur berikut akan menjelaskan mengenai akibat terpenting dari adanya kerusakan terhadap pembangunan regional di Propinsi Maluku. Dengan menggunakan model analisis *Location Quotient* (LQ), indeks Spesialisasi Regional (SI) dan Tipologi Klassen, menunjukkan bahwa pembangunan regional di Maluku sangat dipengaruhi oleh kerusakan. Tanda panah putus-putus menunjukkan adanya hubungan krisis ekonomi yang juga turut mempengaruhi pembangunan regional.

Gambar 1
Evaluasi Pembangunan Regional Pasca Kerusuhan
di Propinsi Maluku



4. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Seirama dengan hasil analisis dapat ditarik beberapa implikasi kebijakan penting dari temuan studi ini sebagai berikut:

Pertama, Diharapkan penetapan kebijakan pembangunan serta pengembangan daerah menurut sektor, sebaiknya lebih memprioritaskan pada subsektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota. Walaupun demikian subsektor lainnya juga perlu mendapat perhatian sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya. Apabila memungkinkan, sebaiknya pengembangan subsektor unggulan diarahkan pada upaya untuk menciptakan keterkaitan antardaerah dalam Propinsi Maluku, sehingga pada gilirannya akan tercipta spesialisasi yang akan menyebabkan bergerakinya perekonomian secara bersama-sama melalui proses pertukaran komoditas antardaerah.

Kedua, diperlukan pengawasan dan evaluasi terhadap fungsi KAPET Seram sebagai penggerak perekonomian (*prime mover*) dan mesin (*generator*) bagi pertumbuhan perekonomian wilayah, sehingga keberadaannya benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan daerah sekitar (*hinterland*).

Ketiga, Agar dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di KAPET Seram yang berada di Kabupaten Maluku Tengah yang posisinya berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat memberikan inisiatif bagi masuknya investasi di daerah ini. Insentif yang dimaksudkan di sini adalah berupa pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana, yang selama ini dianggap menghambat masuknya investasi swasta di daerah tersebut. Kedekatan daerah ini dengan Kota Ambon sebagai Ibu Kota Propinsi Maluku, harus dapat dimanfaatkan ke arah terciptanya interaksi perekonomian antara keduanya. Adanya potensi serta kemudahan yang dimiliki Kota Ambon, sebaiknya dapat dimanfaatkan demi untuk perkembangan perekonomian Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan membuka dan membangun jalan lintas Seram serta mengaktifkan kembali Dermaga Ferry Ambon-Seram (*Dermaga Ferry Liang-Waipirit*) agar dapat menghubungkan kedua daerah tersebut yang selama ini terpisah karena adanya kerusakan.

Keempat, Bagi Kabupaten Pulau Buru yang perekonomiannya sama dengan Kabupaten Maluku Tengah serta letaknya yang dekat dengan Kota Ambon, sebaiknya juga memanfaatkan ke arah terciptanya interaksi perekonomian antara keduanya. Adanya potensi serta kemudahan yang dimiliki Kota Ambon, sebaiknya dapat dimanfaatkan demi untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Pulau Buru. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan membuka kembali Dermaga Ferry Ambon-Buru, agar dapat menghubungkan kedua daerah tersebut yang selama ini terpisah karena adanya kerusuhan.

Kelima, Bagi Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat yang posisinya berada pada daerah berkembang cepat, menunjukkan bahwa di kedua daerah ini diperlukan suatu kebijakan yang dapat memberikan insentif bagi masuknya investasi di daerah ini sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan bagi masyarakat di daerah tersebut. Insentif yang dimaksudkan di sini adalah berupa pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana, yang selama ini dianggap menghambat masuknya investasi swasta di daerah tersebut. Walaupun letak kedua Kabupaten ini secara geografis jauh dari Kota Ambon sebagai Ibu Kota Propinsi Maluku, namun dengan potensi yang dimiliki harus dapat dimanfaatkan ke arah terciptanya interaksi perekonomian antara keduanya. Adanya potensi serta kemudahan yang dimiliki oleh Kabupaten Maluku Tenggara sebagai kabupaten yang tertua, sebaiknya dapat dimanfaatkan demi untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan sebaliknya. Upaya yang dapat ditempuh agar dapat mempercepat pembangunan yaitu melalui pembangunan dan perbaikan transportasi darat, laut maupun udara yang pada gilirannya dapat menarik investor ke daerah ini. Dengan demikian, diharapkan Propinsi Maluku dapat mengejar ketertinggalannya dan disejajarkan daerahnya dengan daerah lain di Kawasan Barat Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad L., (1997). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 3, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik, (2001). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Maluku Menurut Lapangan Usaha*, BPS Provinsi Maluku.
- _____. (2001). *Maluku Dalam Angka*, BPS Provinsi Maluku.
- Kuncoro M., dan Aswandi H., (2002). Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, Vol. 17, No. 1.
- Mubyarto, (2001). Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16, No. 1.
- Radianto E., (1997). Otonomi Daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku, *Prisma LP3ES*, No. 3, Tahun XXVI.
- _____. (2000). Studi Kebutuhan Kuantitas dan Kualitas Untuk Sektor-Sektor Unggulan di Kapet Seram-Maluku, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16, No. 1.
- Sjafrizal, (1997). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, *Prisma LP3ES*, No. 3, Tahun XXVI.
- Soepono P., (1993). Analisis Shift-Share : Perkembangan dan Penerapan, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, No. 1, Tahun VIII.
- _____. (2001). Teori Pertumbuhan Berbasis (Ekspor) : Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-Alat Analisis Regional, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16, No. 1.
- Sukirno S., (1985). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Penerbit, F.E. UI dengan Bina Grafika, Jakarta. ■